

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam berjalannya kegiatan di dalam suatu pemerintahan. Pemerintah merupakan aparatur negara yang memiliki wewenang untuk membuat dan mengatur mengenai sistem yang ada didalamnya. Pemerintah juga selalu memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, karena masyarakat sendiri merupakan individu-individu yang selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya untuk bekerjasama dalam mencapai kepentingan bersama pula. Pemerintah tidak bisa jauh-jauh dari masyarakat karena masyarakat memiliki peran yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang sudah di buat ataupun sudah diatur sebelumnya. Namun, masyarakat juga membutuhkan timbal balik dari pemerintah baik berupa perbaikan dalam tatanan pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahannya. Salah satu bentuk adanya transparansi dan akuntabilitas antara pemerintah dengan masyarakat adalah pembuatan laporan keuangan. Salah satu fenomena yang terjadi di dalam roda pemerintahan saat ini adalah fenomena dimana semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas bagi pemerintah.

Al-Qur'an juga telah menyebutkan mengenai kewajiban manusia untuk menyampaikan amanah pada yang berhak dalam surah *An-Nisa'* ayat 58:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa’:58)

Ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan kepadanya untuk menerbitkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkannya. Selain itu, ayat ini menegaskan mengenai laporan keuangan yang menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah harus dibuat dan diterbitkan secara utuh, sempurna dan tanpa penundaan kepada pihak yang berhak mendapatkannya.

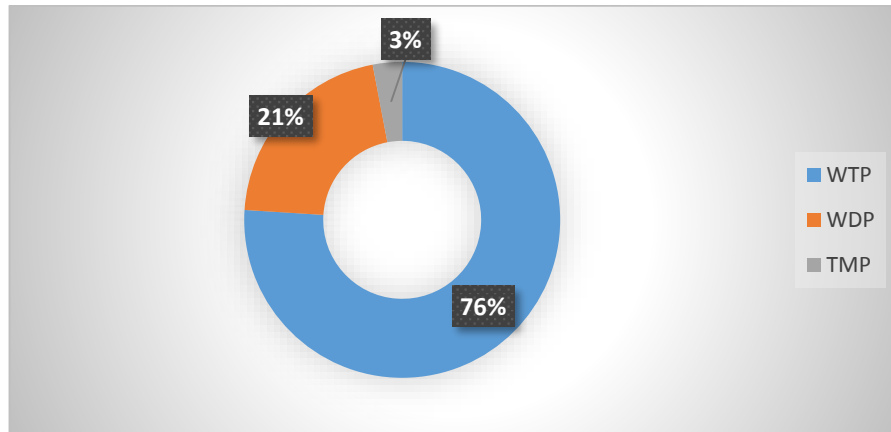
Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan keuangan publik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadikan pemerintah agar membuat laporan keuangan dimana laporan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, terutama dalam akuntabilitas finansial, sehingga masyarakat harus dapat mengetahui mengenai laporan keuangan dalam pemerintah dan pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat serta mempublikasikan laporan pemerintah tersebut.

Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan tersebut menerapkan laporan keuangan karakteristik laporan keuangan sebagai berikut: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum memenuhi kriteria yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami.

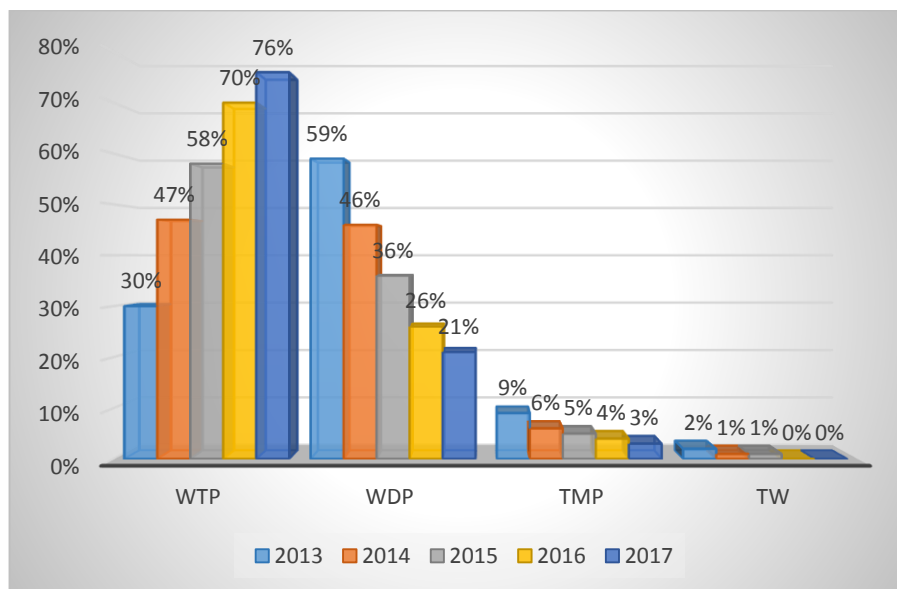
Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan di daerah serta sebagai gambaran mengenai daerah tersebut pemerintah harus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat menjadi objek penilaian tentang bagaimana sistem pemerintahan yang berjalan didalam suatu daerah. Laporan keuangan yang baik dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya memberikan penilaian berupa opini audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimana terdapat empat jenis opini atas laporan keuangan pemerintah, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak menyatakan pendapat (TMP) dan tidak wajar (TW). Dari hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD tahun 2017 ditemukan bahwa LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 76% atau sejumlah 411 LKPD, LKPD yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebesar 21% atau sejumlah 113 LKPD dan LKPD yang

mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebesar 3% atau sejumlah 18 LKPD, seperti terlihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 1.1
Opini LKPD Tahun 2017
Perkembangan opini selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar selanjutnya, pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2.
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2013-2017
Dari gambar di atas digambarkan mengenai perkembangan opini LKPD dari tahun 2013-2017 dimana masih ada beberapa daerah di Indonesia yang belum mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Permasalahan yang terjadi dalam

laporan keuangan sangat menarik untuk diteliti, karena laporan keuangan merupakan suatu bentuk bukti tanggung jawab keuangan pemerintah atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh BPK terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo yang terletak dalam provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir, yaitu pada periode tahun anggaran 2012-2017, didapatkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo selama periode tahun tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana dari hasil perolehan opini yang tersebut diharapkan pemerintah daerah kabupaten Purworejo dapat mempertahankan opini tersebut untuk tahun-tahun yang akan datang. Perolehan opini WTP Pemkab Purworejo juga diharapkan bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas kinerja oleh kabupaten-kabupaten lain yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atau pun dibawahnya agar dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Kiranayanti (2016), penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang paham mengenai akuntansi pemerintahan serta berkompeten tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan. SDM memiliki peran untuk melakukan perencanaan mengenai penyusunan laporan keuangan serta dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tersebut.

Sumber daya manusia (SDM) yang akan menyusun laporan keuangan haruslah memiliki pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) agar memudahkan SDM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah dengan baik dan benar. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mungkin dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. SAKD dapat digunakan untuk tujuan meningkatkan akuntabilitas dan keterandalan dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada saat ini mulai berkembang isu mengenai penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berbasis akrual, sebagaimana telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari SAP yang sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diwajibkan penggunaan Standar Akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dimana sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang digunakan paling lambat lima tahun setelah ditetapkannya aturan tersebut.

Selain Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta mempunyai pemahaman mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi salah satu pemicu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah

mempunyai kewajiban dalam pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005.

Di era modern seperti saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan guna menunjang penyusunan laporan keuangan agar menghemat waktu dan tenaga dari penyusun laporan keuangan tersebut. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga memiliki hak untuk melakukan pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang memadai, sehingga dapat digunakan, dimengerti dengan mudah, dapat dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien, juga di perlukan Sistem Pengendalian Intern dalam pelaksanaannya.

Sistem Pengendalian Intern mungkin juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena sistem pengendalian intern yang dimiliki institusi pemerintah yang baik dapat membuat semakin tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Namun, apabila pengendalian intern dalam suatu pemerintahan itu lemah maka akan sulit pula untuk mendeteksi ketidakakuratan/kecurangan dalam proses akuntansi tersebut.

Dalam opini yang disampaikan BPK mengenai terdapat permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar untuk negara,

salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya penegndalian intern yang terjadi dalam proses pemerintahan yang ada di Indonesia. Dimana kasus permasalahan tersebut terjadi didalam proses pemerintahan yang juga melibatkan aparatur negara. Sistem Pengendalian Intern selalu menjadi pusat perhatian Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugas auditnya sebagai penentuan luas lingkup pengujian yang akan dilaksanakan.

Dalam penelitian terdahulu oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Armel (2017), menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, penelitian dari Wati, Kadek Desiana dkk (2014), menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian dari Herawati, Tuti (2014), menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kemudian penelitian dari Andini,Dewi dan Yusrawati (2015) menunjukkan hasil yaitu, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Terdapat perbedaan faktor-faktor yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya yang kemudian mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga menarik untuk meneliti kembali mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya. Selain itu, dari penelitian yang mengacu pada penelitian dari Armel (2017), terdapat penambahan satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penambahan variabel independen baru yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, perbedaan berikutnya terletak pada lokasi dan sampel penelitian di mana pada penelitian sebelumnya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Dumai, sedangkan pada penelitian kali ini dilakukan pada seluruh SKPD yang berada di bawah pemerintah daerah kabupaten Purworejo.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian replikasi mengenai kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi serta pengendalian intern dengan menambah satu variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan mengubah tahun penelitian. Peneliti memilih SAKD sebagai variabel independen yang ditambahkan karena didalam SAKD sudah memenuhi prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah sepenuhnya disusun berdasarkan SAP.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

Motivasi dari penelitian ini adalah karena masih banyak kota maupun kabupaten di Indonesia yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP), maka hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemecahan masalah bagi kota maupun kabupaten lainnya yang masih belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Motivasi Peneliti berikutnya adalah karena adanya ketidakkonsistenan hasil dalam penelitian-penelitian tersebut yang menjadikan peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian ulang terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena mengingat adanya tuntutan dari pengguna laporan keuangan terhadap pemerintah daerah untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu akuntansi sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan bukti empiris mengenai

pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan pada pihak terkait agar dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.